

TEMPO/TONY HARTAWAN



Pekerja memeriksa mukena sebelum dikirimkan di bengkel kerja Shofura kawasan Pasar Minggu, Jakarta, 7 Agustus lalu.

Mengejar Ekspor Dua Kali Lipat

Industri kecil harus masuk ke rantai pasok global.

Larissa Huda

larissahuda@tempo.co.id

JAKARTA – Kontribusi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif kecil, yaitu sekitar 14 persen. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menargetkan volume ekspor dari produk UMKM naik dua kali lipat dari 14 persen menjadi 28 persen pada 2024.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan salah satu strategi pemerintah adalah memetakan kemampuan

industri kecil dan menengah (IKM) serta industri besar. Menurut Gati, pelaku industri kecil dan menengah perlu memasok industri besar karena mereka harus masuk ke rantai pasok global. Mereka yang sudah bisa menyuplai industri besar akan mudah masuk pasar ekspor.

“Tujuan *link and match* ini supaya pelaku IKM mengetahui persyaratan untuk menjadi pemasok industri besar. Industri besar akan memberikan penilaian, baik bahan baku maupun proses produksi,” tutur Gati kepada *Tempo*, kemarin.

Untuk mendukung tuju-

an tersebut, pemerintah bekerja sama dengan akademikus dan perguruan tinggi untuk menggodok bahan bakunya. Pemerintah juga menyiapkan program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi dengan memberikan potongan harga sebesar 30 persen.

Gati menuturkan pemerintah bekerja sama dengan atase perdagangan atau Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC) untuk memetakan kondisi pasar ekspor. Kementerian pun gencar mencari inovasi produk yang menggunakan bahan baku lokal melalui, misalnya, Indonesia Food

Innovation (IFI), Indonesia Fashion & Craft Awards, ataupun Creative Business Incubator (CBI).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan Kementerian sedang mengkaji produk yang memiliki kekuatan pasar di negara pesaing yang belum dimiliki oleh Indonesia.

Untuk saat ini, terdapat beberapa produk yang berpotensi didorong untuk ekspor, di antaranya produk kayu, furnitur, perikanan olahan, olahan rempah-rempah, dan kopi.

Kasan menjelaskan, untuk *excellent products*, pemerintah mendorong diversifikasi karena telah memiliki kekuatan pasar yang besar. Untuk *emerging* dan *losing products*, peran perwakilan dagang diperlukan untuk mempelajari keunggulan produk dari negara pesaing yang belum dimiliki oleh Indonesia.

Untuk saat ini, terdapat beberapa produk yang berpotensi didorong untuk ekspor, di antaranya produk kayu, furnitur, perikanan olahan, olahan rempah-rempah, dan kopi.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny

Soetrismo mengatakan, untuk mendorong ekspor, UMKM memerlukan peran pedagang eksportir dalam pemasaran dan konsolidasi logistik. Selain itu, pelaku UMKM masih melakukan pembayaran secara tunai. Sementara itu, eksportir menggunakan *letter of credit*.

Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri Indonesia Handito Joewono mengusulkan agar pelaku UMKM tidak dipaksakan untuk menjadi produsen eksportir, melainkan produsen produk ekspor saja. Sedangkan pedagang eksportirnya, ujar Handito, bisa menggunakan produk UMKM.

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (Smesco Indonesia) Leonard Theosabratra mengatakan target kenaikan ekspor hingga 28 persen pada 2024 merupakan target jangka panjang. Menurut Leo, Smesco sudah mulai dengan beberapa langkah, seperti pelatihan dan pendampingan. Langkah tersebut juga difasilitasi, baik secara *online* maupun *offline*.

“Semua butuh waktu karena ini baru tahap awal. Kami sudah ada pusat konsultasi, kampus, dan laboratorium,” ujar Leo.

Apabila tahap tersebut telah dilalui, Leo menuturkan, Smesco mulai mengarahkan kepada perdagangan yang lebih komprehensif, misalnya, dengan menaikkan angka penjualan. “Pada tahap itu, kami tak bicara ekspor dulu, tapi distribusi lokal, termasuk *on boarding* digital, pembinaan, dan pasokan material. Tahun depan, kita mulai bicara ekspor,” ujar Leo.

● LARISSA HUDA

Peran Swasta dalam Sekolah Ekspor

PEMERINTAH meresmikan program Sekolah Ekspor untuk meningkatkan kontribusi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Rabu pekan lalu. Program tersebut merupakan inisiasi pihak swasta dari Learn Business Anywhere Arrby dan National Export Circle yang didukung oleh pemerintah dan asosiasi industri serta pengusaha. Kepala Sekolah Ekspor Handito Joewono menargetkan

ada 10 ribu eksportir baru dalam satu tahun.

“Pihak swasta berbagi pengalaman, pengetahuan dari eksportir berpengalaman. Tapi, itu tidak cukup. Perlu pendampingan dan pembiayaan dari pemerintah,” ujar Handito kepada *Tempo*, kemarin.

Selain konsultasi, Handito mengatakan, Sekolah Ekspor memberikan pendampingan desain, kemasan, dan pengurusan

izin produk. Sejak pendaftaran dibuka pada 25 Juli lalu, jumlah peserta Sekolah Ekspor sudah mencapai 2.000 orang. “Target kami sebetulnya sampai akhir tahun paling sedikit sudah mengeksportir 10 kontainer produk UMKM,” ujar Handito.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan keterlibatan swasta juga

dilakukan oleh Singhasari Special Economic Zone (SEZ) di Malang, Jawa Timur. Saat ini, Gati mengatakan Kementerian meminta bantuan SEZ untuk membangun *brand* dan desain untuk industri furnitur.

Gati mengatakan pemerintah juga memiliki program Indonesia Good Design Selection (IGDS). Asosiasi yang terlibat, ujar Gati, akan menilai hasil produk dari industri kecil dan menengah.

Selain itu, beberapa *market place*, seperti Tokopedia, Shopee, dan Bilibli, ikut terlibat dalam mendukung pelaku UMKM.

“Kami juga bekerja sama dengan mereka bagaimana pelaku UMKM melekat digital,” ujar Gati. Senior Vice President of Merchant Sales, Development, and Operations Bilibli Geoffrey L. Dermawan mengatakan Bilibli telah memberikan dukungan kepada UMKM berupa layanan

menyeluruh dari pergudangan (*warehouse*) hingga ke pengiriman barang yang disediakan untuk para penjual lewat program *Fulfillment by Bilibli*. Program ini, ujar Geoffrey, dapat mengurangi biaya operasional dari penjual apabila mereka harus membangun fasilitas logistik sendiri. Selain itu, Bilibli memberikan kurasi, pendampingan bagi para mitra, hingga pelatihan literasi digital bagi UMKM. ● LARISSA HUDA

T
TEMPO MEDIA GROUP

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Tempo Inti Media Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 25 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Tempo, Jl.Palmerah Barat No.8, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun 2020;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:
Direktur Utama : Toriq Hadad
Direktur : Meiky Sofyansyah
Direktur : Sebastian Kinaatmaja

Dewan Komisaris:
Komisaris : Bambang Harymurti
Komisaris : Agus Setiadi Lukita

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh total pemegang saham yang jumlahnya sebesar **793.071.269** lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **74.94%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak terdapat pemegang saham memberikan pendapat dan saran terkait mata acara pertama, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono”, sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor: 00102/3.0409/AU.1/05/1150-3/1/IV/2020, tertanggal 9 April 2020, dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-lindakan mereka tercantum dalam Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 untuk tidak membagikan dividen. Laba digunakan untuk:

- a. Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) disisihkan untuk Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Perseroan Terbatas.
- b. Sisanya sebesar Rp.2.787.121.000 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), dimasukkan sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020. Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. Tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk besarnya honorarium kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020, dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah maksimal honorarium rutin dari anggota Dewan Komisaris secara keseluruhan adalah sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penghasilan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2020 - 2025 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Toriq Hadad
Direktur : Meiky Sofyansyah
Direktur : Arif Zulkifli
Direktur : Sebastian Kinaatmaja

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Goenawan Mohamad
Komisaris Independen : Ir. Leonard Kusen, MBA
Komisaris Independen : Ir. Kristianto Indrawan MM
Komisaris : Ir. Yohannes Henky Wijaya MM
Komisaris : Bambang Harymurti

Jakarta, 26 Agustus 2020
PT.TEMPO INTI MEDIA,Tbk

Direksi Perseroan